



Pendampingan Akses Pembiayaan dan Kemitraan sebagai Upaya Penguatan BUMDes Tetus Kuanheun, Kabupaten Kupang

Widia Octari Diliana¹, Eve Ida Malau²

Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana

e-mail: widia.diliana@staf.undana.ac.id¹, eveidamalau@gmail.com²

Abstrak

BUMDes Tetus Kuanheun menghadapi keterbatasan pembiayaan dan kendala dalam membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, yang berdampak pada rendahnya kemampuan pengelolaan dan pengembangan usaha. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan, meningkatkan kemampuan memperoleh modal, memperluas jejaring mitra, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat dilakukan melalui metode pendampingan berupa sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengurus BUMDes menjadi lebih memahami alternatif akses pembiayaan formal dan non-formal, pentingnya kerja sama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan platform digital, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dan jaringan kemitraan yang baik. Dengan penguatan literasi keuangan tersebut, BUMDes berpotensi meningkatkan daya saing dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *BUMDes, Literasi Keuangan, Akses Pembiayaan, Kemitraan Strategis.*

Abstract

Tetus Kuanheun Village Owned Enterprise faces limited funding and obstacles in establishing strategic partnerships with various parties, resulting in poor business management and development capabilities. This community service activity aims to strengthen financial literacy, increase capital acquisition capabilities, expand partner networks, and sustainably develop the business. The Community Partnership Program is implemented through mentoring methods in the form of outreach and Focus Group Discussions (FGDs). The results of these activities indicate that Village Owned Enterprise administrators have a better understanding of alternative access to formal and informal financing, the importance of collaboration with financial institutions, local governments, the private sector, and digital platforms, and increased awareness of the importance of financial literacy and a strong partnership network. By strengthening financial literacy, Village Owned Enterprise has the potential to increase its competitiveness and contribution to Village Original Income in a sustainable manner.

Keywords: *Village Owned Enterprise, Financial Literacy, Access to Financing, Strategic Partnerships.*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa dengan mengelola potensi lokal, meningkatkan pendapatan desa, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (Kemendes PDTT, 2023).

Berdasarkan laporan Kemendes PDTT (2023), hingga saat ini terdapat lebih dari 50.000 BUMDes aktif di seluruh Indonesia yang telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan desa dan menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan usaha produktif, seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya akses pembiayaan yang memadai, sehingga usaha yang dijalankan tidak optimal (Abdullah, 2024; Prihatini & Wardoyo, 2025).

Kondisi ini juga dialami oleh BUMDes Tetus Kuanheun, yang hingga saat ini masih bergelut dengan keterbatasan modal, rendahnya pemasukan usaha, dan minimnya dukungan eksternal berupa kemitraan. Usaha yang dijalankan belum mampu dikenal luas oleh masyarakat maupun pasar yang lebih besar, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) relatif kecil. Temuan Zain (2021) menunjukkan bahwa keterbatasan permodalan merupakan faktor dominan yang menghambat peningkatan kapasitas usaha dan daya saing BUMDes.

Selain keterbatasan pembiayaan, BUMDes juga menghadapi kendala dalam membangun kemitraan strategis. Padahal, kerja sama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun platform digital dapat membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas. Menurut Amiril (2023) menegaskan bahwa penguatan pengelolaan dan pembiayaan BUMDes melalui kemitraan lintas sektor menjadi strategi penting untuk memperluas pasar, meningkatkan kredibilitas usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Sejumlah studi pengabdian masyarakat menunjukkan pentingnya intervensi pada aspek pembiayaan dan kemitraan. Menurut Prihatini & Wardoyo (2025) menemukan bahwa akses pembiayaan melalui skema perbankan maupun program pemerintah berpengaruh signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan usaha desa. Sementara itu, Munawar (2025) menegaskan bahwa strategi kemitraan dan inovasi usaha mampu meningkatkan daya saing BUMDes sekaligus memperluas jaringan usaha di tingkat lokal maupun regional.

Meskipun berbagai program dan sumber pembiayaan tersedia, BUMDes Tetus Kuanheun masih belum mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal karena keterbatasan literasi keuangan, kapasitas SDM, dan jaringan kemitraan. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kepada BUMDes Tetus Kuanheun yang menghadapi kendala dalam memanfaatkan program dan sumber pembiayaan akibat keterbatasan literasi keuangan, kapasitas SDM, dan jaringan kemitraan. Pendampingan difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan pemahaman tentang berbagai sumber pembiayaan yang dapat diakses, baik dari lembaga formal (perbankan, KUR, maupun program pemerintah) maupun non-formal, serta membimbing pengurus BUMDes dalam membangun kemitraan strategis dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan platform digital. Dengan demikian, tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah memperkuat literasi keuangan, meningkatkan kemampuan memperoleh modal, memperluas jejaring mitra, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PADes dan menjadi model pengembangan ekonomi desa yang dapat direplikasi di desa lain.

METODE

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan melalui sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD). Metode ini dipilih karena mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat sekaligus menghasilkan solusi yang aplikatif bagi pengembangan BUMDes (Hamril *et al.*, 2021). Sistematika kegiatan terbagi dalam dua langkah utama.

Pertama, dilakukan survei dan diskusi awal. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Kepala Desa, pengurus BUMDes, pengawas BUMDes, dan perwakilan masyarakat untuk menggali kondisi aktual. Survei dan diskusi bertujuan mengetahui jenis usaha yang dijalankan BUMDes, seperti penyewaan tenda, kursi, traktor, suplai air, serta produksi batako. Pada tahap ini juga diidentifikasi kendala utama yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan minimnya kemitraan strategis.

Kedua, dilakukan pendampingan melalui sosialisasi materi dan FGD. Tahap ini menitikberatkan pada pemahaman jenis-jenis pembiayaan yang dapat diakses BUMDes, baik dari lembaga formal (perbankan, KUR, program pemerintah) maupun non-formal. Selain itu, pendampingan difokuskan pada strategi membangun kemitraan dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan platform digital. FGD terbukti efektif dalam menggali aspirasi, meningkatkan literasi, serta memperkuat kapasitas pengelola BUMDes (Arman *et al.*, 2019).

Ketiga, diskusi interaktif dan simulasi pemecahan masalah. Pada tahap ini, pengurus BUMDes diberi kesempatan untuk menyampaikan kendala yang dihadapi, kemudian bersama tim pendamping mencari solusi yang aplikatif. Melalui diskusi interaktif ini, pengurus memperoleh wawasan praktis untuk memperkuat literasi keuangan dan membangun jejaring usaha yang lebih luas.

Keempat, penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan. Tahap akhir adalah merangkum seluruh rangkaian kegiatan dalam bentuk laporan dan dokumentasi. Hasil ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang, sekaligus sebagai bahan pengembangan model pemberdayaan BUMDes melalui penguatan akses pembiayaan dan kemitraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan positif yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, diawali dengan proses identifikasi permasalahan atau kebutuhan yang sedang dihadapi masyarakat di lokasi pengabdian. Keberadaan sasaran dan tujuan yang jelas menjadi hal penting yang harus dicapai bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian Jaya & Rafi (2018) yang menemukan bahwa identifikasi masalah secara tepat menjadi kunci agar program pengabdian dapat menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Pada tanggal 6 Agustus 2025, dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di BUMDes "TETUS" di Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. BUMDes "TETUS" ini sudah didirikan sejak tahun 2017. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada pendampingan materi terkait akses pembiayaan dan kemitraan bagi BUMDes Tetus Kuanheum. Kegiatan dilaksanakan di kantor desa Tetus dan dihadiri oleh Kepala Desa, pengurus dan pengawas BUMDes, perwakilan masyarakat desa sebagai peserta dan dosen-dosen prodi akuntansi Universitas Nusa Cendana yaitu Widia Octari Diliana, S.Pd., M.Ak., Eve Ida Malau, S.Pd., M.Si, Yohanes Demu, SE.,MSA, Filipus A. G. Suryaputra, S.E.,M.Ak. Acara diawali dengan doa bersama dan sambutan dari pihak kepala desa serta tim pengabdian.



Gambar 1. Doa bersama pada awal kegiatan pengabdian di Kantor Desa Tetus



Gambar 2. Sambutan dari Kepala Desa Tetus didampingi Tim Pengabdian Universitas Nusa Cendana

Selanjutnya, Kepala desa menyampaikan secara terbuka kondisi dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha BUMDes, antara lain keterbatasan modal, rendahnya pemasaran produk, serta minimnya jejaring mitra dengan pihak eksternal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ibrahim *et al.* (2019) yang menekankan bahwa keterbatasan modal dan lemahnya jejaring eksternal merupakan hambatan utama dalam pengembangan BUMDes di banyak daerah. FGD terbagi menjadi 2 sesi pemaparan materi dan pemantik diskusi dengan teman: (1) Akses Pembiayaan. Tim pengabdian kemudian memberikan materi mengenai jenis-jenis pembiayaan yang dapat diakses BUMDes, baik dari lembaga formal maupun non-formal, serta (2) Kemitraan. Strategi membangun kemitraan dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan platform digital. Pendampingan dilakukan secara interaktif melalui diskusi, tanya jawab, dan simulasi pemecahan masalah sesuai dengan usaha yang dijalankan BUMDes.

Akses Pembiayaan

Berdasarkan Permendesa PDPT No. 3 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (5), penguatan pengelolaan aset dan permodalan BUMDes dapat dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa unit usaha BUMDes Tetus penyewaan tenda dan kursi, penyediaan traktor, suplai air bersih, produksi batako, serta penjualan kacang tanah masih terkendala modal untuk memperbesar kapasitas usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian Raharjo *et al.* (2022) yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab kegagalan BUMDes adalah lemahnya sistem permodalan dan pencatatan keuangan. Akses pembiayaan penting untuk mendukung pengembangan usaha, pembelian sarana produksi, dan perbaikan tata kelola keuangan. Alternatif yang dapat dimanfaatkan meliputi: pendanaan APBDes, program pemerintah, kredit perbankan, pinjaman modal dari anggota, dan kerja sama dengan pihak swasta. Lembaga pembiayaan biasanya menilai kelayakan pinjaman melalui prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), sehingga BUMDes perlu menyiapkan dokumen kelembagaan, rencana bisnis, laporan keuangan sederhana, dan legalitas usaha. Strategi utama agar BUMDes lebih mudah memperoleh pembiayaan adalah menyusun business plan yang baik, menjaga

pembukuan yang transparan, membangun kemitraan, memperkuat rekam jejak usaha, serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola (Mu'minin *et al.*, 2024). Dengan strategi ini, BUMDes berpeluang memperluas unit usaha, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

Akses Kemitraan

Kemitraan menjadi strategi penting bagi BUMDes untuk memperluas usaha, memperoleh modal, teknologi, dan pasar baru. Bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan swasta, lembaga keuangan, pemerintah, maupun antar BUMDes. Manfaat kemitraan bagi BUMDes adalah memperoleh sumber daya dan modal tambahan, memperluas pasar untuk meningkatkan penjualan, serta memperkuat kapasitas manajemen dan kualitas SDM dalam pengelolaan usaha (Ichsan *et al.*, 2021; Kurniasih *et al.*, 2019). Strategi utama identifikasi mitra potensial, komunikasi efektif, penyusunan MoU, serta evaluasi berkala. Contoh praktik dalam BUMDes Tetus dapat bermitra dengan BUMDes lain melalui BUMDes Bersama, bekerjasama dengan EO, koperasi atau bank untuk modal, serta memanfaatkan *e-commerce* dalam pemasaran produk. Kemitraan yang terkelola baik akan meningkatkan daya saing BUMDes dan memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat desa.



Gambar 3. Pemaparan Materi terkait Akses Pembiayaan dan Kemitraan

Setelah tim pemateri selesai menyampaikan materi, kegiatan dilanjutkan dengan proses diskusi dan tanya jawab antara pemateri, kepala desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat desa. Dalam sesi diskusi ini, kepala desa dan pengurus BUMDes menyampaikan bahwa BUMDes Kuanheum sudah pernah mencoba mengajukan pembiayaan melalui salah satu lembaga keuangan formal, namun terkendala ada pada syarat jaminan (agunan) yang belum dapat dipenuhi, Selain itu, laporan keuangan yang selama ini disusun oleh BUMDes masih kurang tepat, baik dari sisi format maupun kelengkapan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha secara akurat.

Menanggapi hal tersebut, tim pendamping memberikan masukan alternatif berupa pemanfaatan sumber pembiayaan dari koperasi simpan pinjam atau melalui pinjaman masyarakat desa yang memiliki modal lebih, dengan

mekanisme yang transparan dan disepakati bersama. Alternatif ini dinilai lebih realistis bagi BUMDes yang belum memiliki aset memadai sebagai agunan. Selain itu, tim pengabdian juga menekankan pentingnya kesiapan internal sebelum mengajukan pembiayaan, baik ke lembaga formal maupun non-formal. Beberapa hal yang harus dipersiapkan BUMDes antara lain: merapikan laporan keuangan secara sederhana namun transparan (pencatatan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan), menyusun proposal usaha yang jelas dengan proyeksi keuntungan, melengkapi dokumen legalitas BUMDes, serta menyiapkan profil BUMDes yang memuat visi, misi, dan unit usaha yang dijalankan, meningkatkan literasi keuangan pengurus, pemahaman pengurus terhadap mekanisme pembiayaan, bunga pinjaman, serta kewajiban pelaporan akan membantu BUMDes mengelola pembiayaan dengan bijak. Dengan kesiapan administrasi dan tata kelola keuangan yang baik, BUMDes akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari lembaga pembiayaan maupun mitra kerja sama.

Hasil yang dapat dirasakan dari kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan terkait akses pembiayaan dan kemitraan bagi BUMDes Tetus Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yaitu:

- a. Dari yang semula pengurus dan masyarakat desa belum memahami secara jelas mengenai jenis-jenis sumber pembiayaan serta pola kemitraan strategis, melalui kegiatan ini mereka menjadi lebih mampu memahami alternatif akses pembiayaan baik formal maupun non-formal, serta pentingnya membangun kerja sama dengan lembaga keuangan, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun platform digital.
- b. Muncul kesadaran baru dari pengurus BUMDes dan masyarakat desa mengenai pentingnya literasi keuangan, akses permodalan, dan jaringan kemitraan yang baik sebagai kunci keberlanjutan usaha BUMDes dalam mendukung peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya harapan besar dari pengurus BUMDes dan masyarakat agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan, karena mereka merasa membutuhkan pendampingan lanjutan dan dukungan dari perguruan tinggi untuk penguatan kapasitas usaha, perluasan akses modal, serta pengembangan jaringan kemitraan bagi BUMDes Tetus Kuanheun. Hal ini sejalan dengan temuan Soejono *et al.* (2021) yang menekankan bahwa keberlanjutan kinerja BUMDes tidak hanya ditentukan oleh modal usaha, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pendampingan, tata kelola yang baik, serta dukungan kemitraan dengan pihak eksternal.



Gambar 4. Foto bersama Kepala Desa, Pengurus BUMDes, Perwakilan Masyarakat Desa dan Dosen-dosen Akuntansi Undana.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan di BUMDes Tetus Kuanheun menunjukkan bahwa keterbatasan modal dan minimnya kemitraan menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha. Melalui metode sosialisasi dan FGD, pengurus memperoleh pemahaman tentang pentingnya pencatatan keuangan sederhana, persiapan dokumen legalitas, serta strategi pengajuan pembiayaan melalui sumber formal maupun non-formal. Pendampingan ini juga menekankan pentingnya menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan, pemerintah, sektor swasta, antar BUMDes, maupun platform digital untuk memperluas jaringan usaha, meningkatkan kredibilitas, dan membuka akses pasar. Dengan penguatan literasi keuangan, tata kelola usaha, serta akses pembiayaan dan kemitraan, BUMDes berpotensi meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan.

Sebagai saran, BUMDes Tetus Kuanheun disarankan untuk mulai menyusun pencatatan keuangan sederhana agar transparansi dan akuntabilitas meningkat. Selain itu, perlu dipersiapkan dokumen legalitas serta rencana pengembangan usaha sebagai syarat akses pembiayaan, sekaligus lebih proaktif memperluas kemitraan dengan koperasi, lembaga keuangan, pemerintah, sektor swasta, maupun platform digital. Pemerintah desa dan daerah diharapkan memberi pendampingan berkelanjutan dalam literasi keuangan, manajemen, dan akses modal, sementara perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui edukasi dan pemberdayaan kapasitas pengurus. Partisipasi aktif masyarakat juga penting untuk mendukung usaha BUMDes dan menjaga keberlanjutan modal sosial, sehingga BUMDes dapat tumbuh lebih kuat serta berkontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Penyertaan Modal BUMDes dalam Meningkatkan Kontribusi terhadap

- PADes. *Journal of Syariah and Accounting Public*, 7(1), 61–62. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/article/download/3023/1799>
- Amiril, M. (2023). Penguatan Pengelolaan dan Pembiayaan BUMDes melalui Kemitraan Strategis. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 55–64.
- Arman, A., Marsuki, & Sulkipli. (2019). BUMDes Development Model Through College and Banking Partnerships. *Proceedings of the International Conference on Community Development*, 2, 47–52. <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.148>
- Hamril, A., Sarjan, & Arifin, S. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone (Perspektif Ekonomi Syariah). *Jurnal Al-Tsarwah: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 147–163. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i1.1613>
- Ibrahim, I. T. S., Abdullah, K., Mas'ad, & Sutarna, T. (2019). Faktor Penghambat dan Pendukung BUMDes pada Kawasan Pertambangan Emas di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 1–10. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Ichsan, R. N., Nasution, L., & Sinaga, S. (2021). *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Jaya, R., & Rafi, M. (2018). Analisis Hambatan dalam Pengembangan BUMDes (Studi Kampung Rempak Kabupaten Siak). *El-Riyasah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 9(1), 22–34. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1>
- Kemendes PDTT. (2023). *Laporan Tahunan BUMDes 2023*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kurniasih, D., Setyoko, P., & Wijaya, S. (2019). Implementasi Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9(2), 134–143.
- Mu'minin, M., Rohman, F., & Fauziyah, R. (2024). Strategi Mengatasi Hambatan Perkembangan BUMDes: Kajian di Desa Jumput, Bojonegoro. *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.20961/imscs.v2i1.529>
- Munawar, W. (2025). Strategi Kemitraan BUMDes dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Pedesaan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.30997/jn.v11i1.18735>
- Prihatini, A., & Wardoyo, W. (2025). Permasalahan Permodalan dan Akses Pembiayaan BUMDes di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 13(2), 150–162.
- Raharjo, T., Wirawan, A., Yudanto, A. A., & Kusmulyono, M. S. (2022). Eksplorasi Faktor-Faktor Kegagalan Badan Usaha Milik Desa. *Eqien: Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis, 11(2), 463–477.
<https://doi.org/10.34308/eqien.v11i02.970>

Soejono, D., Zahrosa, D. B., Maharani, A. D., Baihaqi, Y., & Amam, A. (2021). Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 18(1), 26–37.
<https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.44240>

Zain, M. (2021). Faktor Penghambat Pengembangan Usaha BUMDes di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–57.